



► DINAMIKA PENDIDIKAN

Federasi Serikat Guru Minta Tatap Muka TK-SD Ditunda

Sirojul Khafid, Catur Dwi Janeti,
& Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com

JAKARTA—Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah untuk tidak menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD).

Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, mendorong pemerintah daerah agar tidak menggelar PTM untuk PAUD, TK, dan SD kelas 1 hingga 3, karena rentan penularan Covid-19. Peralnya,

anak-anak di jenjang tersebut belum mendapatkan vaksin dan perilakunya masih sulit dikontrol.

Ia menuturkan jumlah peserta didik dan tenaga pendidik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 mencapai 19.153 orang. "Ini angka yang sangat besar. PTM baru digelar 42 persen satuan pendidikan saja sudah tinggi kasusnya, apalagi jika PTM digelar serentak," ujar Heru dalam keterangannya, Minggu (26/9).

► Halaman 10

Federasi Serikat...

Menurutnya, FSGI masih bingung dengan kebijakan pemerintah yang membuka sekolah jenjang PAUD dan SD, tetapi justru tidak membuka PTM untuk Perguruan Tinggi. Padahal mahasiswa umumnya sudah mendapatkan vaksin, dan perilakunya lebih mudah dikontrol.

Heru menyampaikan FSGI mendorong pemerintah daerah dan Kemendikbud Ristek segera berkoordinasi untuk mengevaluasi 118.000 sekolah di wilayah PPKM level 1-3 yang telah menggelar belajar tatap muka secara terbatas.

"Jika ada contoh, baiknya dipublikasi. Jika ada contoh buruk yang berdampak pada kluster sekolah, maka hal tersebut dapat jadi pelajaran semua satuan pendidikan, baik yang sudah PTM maupun yang akan PTM," jelas guru di SMPN 27 Jakarta itu.

FSGI juga meminta pengawasan yang lebih ketat dari gugus tugas daerah dan dinas terkait terhadap penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan yang menggelar PTM.

FSGI mendapatkan laporan masih ada pelanggaran protokol kesehatan saat PTM dilaksanakan oleh satuan pendidikan. FSGI juga mendesak pemerintah melakukan percepatan dan pemerataan distribusi vaksinasi anak usia 12-17 tahun.

Pernyataan FSGI itu sejalan

dengan SE yang dikeluarkan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Dalam SE dinyatakan salah satu syarat PTM digelar setelah 80% warga sekolah divaksin.

Dengan demikian jenjang PAUD, TK, dan SD tidak bisa menggelar PTM karena siswanya belum bisa divaksin. Kini, Disdikpora DIY masih berkoordinasi dengan Disdikpora Kabupaten/Kota terkait kebijakan itu.

Disdikpora Kota Jogja menyatakan belum memiliki rencana membuka PTM untuk tingkat PAUD, TK, dan SD kelas I sampai IV. "Belum [ada rencana memulai PTM untuk PAUD, TK, dan SD kelas I sampai IV]," kata Kepala Disdikpora Jogja, Budi Santosa Asrori, Sabtu (25/9).

Untuk SD kelas V dan VI serta tingkat SMP, PTM sudah berlangsung sejak Senin (20/9). Sejauh ini belum ada evaluasi mendasar, hanya perlu kerja lebih keras dalam mengingatkan proses pada seluruh pihak. Belum ada pula laporan peserta didik atau guru yang berstatus positif Covid-19 sejak PTM berlangsung di Kota Jogja.

Namun kebijakan PTM di DIY masih belum seragam. PTM di tingkat SD di Kabupaten Bantul tetap dilaksanakan pada Oktober. Sekolah yang telah memenuhi syarat, akan diizinkan menggelar uji coba PTM. "Oktober nanti sudah bisa mulai. Tapi itu tidak semua, tidak

bareng. Kalau yang memenuhi [syarat] baru kita buka, kalau enggak ya enggak," kata Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Pulung Haryadi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana memastikan sampai saat ini belum dapat memastikan apakah PTM untuk PAUD dan SD bisa dilaksanakan atau tidak. Begitu juga dengan pelaksanaan PTM jenjang SMP.

"Besok [hari ini] baru mau laporan ke Bu Bupati. Tunggu dulu sampai ada instruksi dan edaran dari bupati," katanya, Minggu (26/9).

Ery mengatakan laporan yang akan disampaikan kepada Bupati terkait juga dengan SE Gubernur DIY tentang Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY.

Ery mengatakan PTM di masa transisi akan dilaksanakan selama dua bulan sembari melihat situasi dan kondisi serta mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan. Sekolah-sekolah sudah diminta mempersiapkan diri terkait dengan SOP pembelajaran tatap muka terbatas pada masa transisi. "Kami canangkan masa transisi dua bulan sembari melihat perkembangan situasi dan kondisi Covid-19," katanya. (Catur Dwi Janati/Bisnis.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005